

Kekuasaan Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia

Yuni Oktaviarani¹, Siti Tiara Maulia²

Program Studi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi^{1,2}

*E-mail: yunioktaviarani096@gmail.com

Abstrak

Politik identitas telah menjadi tantangan serius bagi demokrasi dan stabilitas nasional Indonesia pasca-reformasi. Penyalahgunaan politik identitas oleh elit politik, yang sering kali memanfaatkan opini publik dan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mengancam proses demokratisasi yang sehat. Kegagalan dalam mengubah masyarakat menjadi lebih demokratis memungkinkan politik identitas untuk terus bertahan. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang kritis, rasional, dan partisipatif dalam proses politik. Peningkatan edukasi politik yang inklusif dan mendalam perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk memahami nilai-nilai demokrasi, mengidentifikasi manipulasi politik, dan memperjuangkan tata kelola yang baik. Dengan demikian, pendekatan pendidikan politik dapat menjadi solusi untuk mengatasi politik identitas dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kekuasaan, Politik identitas, Demokrasi



Licenses may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licenses may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang menganut doktrin Pancasila. Namun, setelah reformasi, masyarakat kini menghadapi sejumlah kesulitan, salah satunya adalah munculnya politik identitas, yang memberikan prioritas pada identitas atau simbol kelompok tertentu untuk mencapai pengaruh politik. Amerika Serikat melihat munculnya politik identitas pada tahun 1970-an sebagai respons terhadap tantangan kelompok ras, gender, dan etnis yang terpinggirkan. Manusia selalu termotivasi oleh kebutuhan untuk diakui. Menghormati martabat setiap orang adalah satu-satunya cara untuk secara rasional menjawab kerinduan akan pengakuan universal. Jenis alternatif pengakuan parsial berdasarkan kebangsaan, agama, sekte, ras, etnis, jenis kelamin, atau keinginan seseorang untuk diakui sebagai superior.

Pesan-pesan politik semacam ini cukup tepat pada masa pemerintahan otoriter-sentralistik pemerintahan Suharto. Namun, struktur pemerintahan telah berkembang seiring berjalannya waktu, beralih dari model otoriter-sentralistik ke model desentralisasi-demokratis. Dalam konteks politik Indonesia modern, pernyataan "Saya Indonesia" dalam pidato di Jakarta sangatlah meragukan. Pada kenyataannya, rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat tidak selalu terwujud melalui upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk memperbaiki bentuk pemerintahan demokratis di Indonesia. Sebenarnya hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai haknya masing-masing

Kebebasan adalah kesempatan yang sama yang dimiliki setiap orang di dalamnya. Sejarah Indonesia telah memantapkan bahwa Pancasila adalah hakikat seluruh rakyat Indonesia dan sumber

vitalitas negara. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diterima sebagai unggul, maka negara Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan bangsa yang mempunyai kemampuan dan daya tahan untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, budaya, dan kepercayaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, khususnya berfokus pada tinjauan literatur. Menurut Yulianti & Jufri (2020), dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak. Hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana kekuasaan politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas. Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan.

Hasil dan Pembahasan

Defenisi Kekuasaan Politik Identitas

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah apa yang dapat diperoleh seseorang/kumpulan untuk mengamalkan ahli tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak dapat dilakukan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk memengaruhi tingkah laku individu/ kelompok sesuai keinginan orang pelaku tersebut (Budiarjo, 2002).

Kekuasaan tidak sama dengan kekuatan, kekuasaan adalah kapasitas untuk memengaruhi orang lain dengan tujuan bahwa individu perlu melakukan keinginan untuk memengaruhi (Heywood, 2004). Kekuasaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, ada yang (memaksa) dan ada yang dengan kesepakatan (tanpa paksaan). Contoh kekuatan yang didapat dengan kesepakatan adalah ras umum, pengaturan, hibah sesuai prinsip yang sesuai.

Kemampuan seseorang atau sekelompok individu untuk membentuk tindakan individu atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan dan tujuannya disebut kekuasaan. Otoritas politik adalah "kemampuan untuk mempengaruhi pengaturan publik (pemerintah) baik dalam perkembangannya maupun hasilnya sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri". Kekuasaan politik pada dasarnya adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan sumber daya kekuasaan yang memungkinkan mereka menerapkan hukum di wilayahnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber ini bisa berupa media umum, media massa, mahasiswa, tokoh politik, pelopor lokal, atau angkatan bersenjata.

2. Politik identitas

Politik identitas pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan politik bahkan persoalan ideologis sehingga menjadi topik yang sangat kompleks. Strategi multikulturalisme kosmopolitan, dimana penciptaan masyarakat kosmopolitan tidak terlalu terobsesi dengan identitas, dapat mengalahkan politik identitas. Kami akan berupaya menghilangkan semua hambatan budaya dalam masyarakat ini sehingga tidak ada anggota atau kelompok yang dibatasi oleh budaya tertentu. Untuk secara bebas membangun kehidupan budaya seseorang dan untuk terlibat serta bereksperimen dengan informasi, kebebasan sangatlah penting.

Dalam politik dunia nyata, identitas yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan seringkali digunakan sebagai instrumen politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat umum, memenangkan pemilu, atau mencapai tujuan politik tertentu seperti memutuskan hubungan dengan Republik Indonesia. . Mengingat politik identitas pada hakikatnya merupakan fenomena

politik yang menonjolkan disparitas identitas individu. Politik identitas menjadi permasalahan besar masyarakat Indonesia saat ini karena berkontribusi terhadap disintegrasi negara.

Politik identitas benar-benar merugikan demokrasi yang bersifat inklusif, egaliter, dan menjunjung tinggi kebebasan hak-hak sipil. Situasi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana identitas politik dihidupkan kembali secara luas melalui konflik, kekerasan, dan prasangka terhadap kelompok lain, yang semuanya dimungkinkan oleh demokrasi. Meningkatnya kejahatan kebencian dan pengabaian terhadap kewirausahaan identitas—yaitu, peran penting yang dimainkan oleh mereka yang mengatur dan mempolitisasi identitas—adalah dua faktor yang berkontribusi terhadap menguatnya politik identitas. Politik identitas cenderung membatasi dibandingkan membebaskan, sehingga menjadikannya berbahaya.

Klaim legitimasi dan keterwakilan bersifat ambigu, dan para elit dapat memanipulasinya demi kepentingan agenda mereka sendiri. Fukuyama mengkaji kebangkitan politik identitas dari sudut pandang psikologi politik. Thymos menurut definisinya adalah ciri-ciri manusia yang bertujuan untuk pengenalan jati diri agar merasa dihormati, bangga, dan sebagainya. Isotimia, di sisi lain, adalah keinginan untuk kesetaraan dalam hal rasa hormat dan perlakuan.

Konsep Politik Identitas

Identitas politik sendiri merupakan sebuah konsep baru dalam ilmu politik. Politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan individu dalam tubuh. Dalam fiksi, gelombang ini tampaknya telah dimulai jauh sebelumnya, namun penerapannya dalam ilmu politik telah berkurang sejak ditanggguhkan pada konferensi internasional Asosiasi Internasional Ilmu Politik yang diadakan di Washington pada tahun 1994.

Oleh karena itu, toleransi politik atau toleransi politik, sangat dipengaruhi oleh suasana, sistem, dan praktik politik yang ada. Menurut John Sullivan dan rekannya, yang meneliti konsep dan praktik toleransi politik di tiga negara berbeda—Amerika Serikat, Israel, dan Swedia—ada tingkat toleransi yang berbeda-beda. Situasi tersebut di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur dan sistem politik, psikologi politik, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Kelebihan dan Kelemahan Politik Identitas

Pendekatan Kemala terhadap politik identitas sangat berbeda dengan pendekatan Agnes Heller dan Donald L. Morowitz. Selain itu, Kemala melihat politik identitas yang ada dalam tataran praktis. Biasanya digunakan sebagai alat pengelolaan alat untuk melaksanakan strategi politik berdasarkan pertimbangan ekonomi dan politik. Namun, di sisi lain, Archimedes mengalami kesulitan dalam menjelaskan hal-hal berikut: dalam kaitannya dengan identitas politik, kemungkinan besar ikatan kesukuan akan mempunyai arti penting; ini akan berfungsi sebagai simbol agama yang signifikan dan sumber kekuatan untuk tindakan politik: a) Implikasi dari pemahaman tersebut adalah sebagai berikut, Pertama, bertujuan untuk mengakui hak asasi manusia sebagai hak fundamental, baik yang berkaitan dengan politik, ekonomi, maupun masyarakat. Kedua, menjaga dan melitta nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok gerah. Terakhir, ketidaksetujuan yang kuat terhadap etnis yang mereka ikuti.

Pokok-pokok Demokrasi Pancasila Pokok-pokok Demokrasi

1) Kebebasan Prinsip-prinsip demokrasi adalah kesetaraan dan kebebasan. Kebebasan dipandang sebagai cara untuk maju dan memaksimalkan manfaat pekerjaan masyarakat tanpa campur tangan negara. Setiap orang dijamin mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, bebas dari diskriminasi, dan diberi akses yang sama terhadap peluang untuk mengembangkan diri. Kebebasan yang dianut oleh demokrasi Pancasila; 2) Kedaulatan rakyat (kedaulatan rakyat). Kehendak dan kemaslahatan rakyat merupakan inti politik jika menyangkut gagasan kerugian negara. Sistem semacam ini memiliki dua tujuan. Mengurangi kemungkinan menutup-nutupi

kekuasaan dan memastikan kepentingan masyarakat diutamakan; 3) Tata kelola yang akuntabel dan transparan. Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi sebagai lembaga pengawas dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Politik Identitas Mengancam Persatuan dan Kesatuan NKRI

Secara konseptual, Politik Nasional Pancasila yang multikultural masuk akal sebagai kebalikan dari praktik politik identitas partikularistik. Perang kemerdekaan tidak lebih dari penerapan praktik politik yang mengidentifikasi pola dan taktik sebagai cara efektif untuk memobilisasi kekuatan nasional untuk melawan penjajah saat ini. Pembagian politik et empera, atau "crock pot", adalah taktik yang digunakan oleh kolonial Belanda di masa lalu. Itu dia. Perselisihan politik terkait identitas juga muncul di berbagai negara, seperti yang terlihat dari sejarah konflik serupa di seluruh dunia. Berdasarkan politik identitas, kita dapat mengidentifikasi sisa-sisa perang. Simak konflik antara Katolik dan Protestan di sejumlah negara Eropa dan Asia, termasuk Skotlandia, sebagai bagian dari urusan dalam negeri Inggris. Perang Saudara Amerika, Perjuangan Saudara Amerika, pertarungan antara penduduk asli dan asing di Semenanjung Malaysia, pembubaran Yugoslavia, perang di Suriah dan Afghanistan, politik anti-Semit dan pertumbuhan radikalisme dan terorisme yang terjadi di seluruh dunia.

Politik persahabatan telah memasukkan politik identitas dan tidak lagi terfokus pada egoisme sektoral, kelompok, atau partikularistik. Tidaklah terlalu berlebihan untuk berasumsi bahwa pada akhirnya, "kecurigaan" akan muncul mengenai penyebaran virus politik identitas sebagai taktik di seluruh dunia untuk melumpuhkan kekuatan-kekuatan yang dianggap membahayakan kelangsungan dominasi sosial, politik, dan ekonomi mereka.

Melalui penerapan sistem multipartai dan pemilu langsung menimbulkan hak kebebasan politik di satu sisi, namun juga berpotensi menimbulkan anarki sosial bahkan anarki nasional di sisi lain. Kita telah terlibat dalam praktik demokrasi liberal (liberalisasi politik) hampir tanpa batas, bahkan tanpa tujuan yang cukup jelas. Masyarakat dari berbagai latar belakang suka mempermainkan identitas sebagai komoditas dalam politik kekuasaan, mengabaikan politik kenegaraan dan nasional yang berdasarkan falsafah Pancasila.

Tanpa memperhitungkan rasa tepo seliro (memahami) yang sebelumnya dilakukan oleh para founding fathers bangsa ketika mereka bekerja dan berjuang, secara dialektis merancang, menyepakati, dan menerima Pancasila sebagai ideologi resmi, maka logika politik berpikir tentang jati diri juga demikian. secara sempit telah dibenarkan. Beberapa pemimpin politik dari kelompok yang terinspirasi oleh nilai-nilai dan menganut ide-ide yang datang dari luar telah berupaya melakukan penyimpangan dalam penggunaan politik identitas untuk mencapai tujuan jangka pendek mereka dan mewujudkan ilusi politik yang telah lama terkubur.

Kesimpulan

Untuk mengatasi fenomena identitas politik yang ada dalam demokrasi Indonesia, Pemerintah, Kemendagri RI, Kemenkominfo RI, dan Pemimpin Partai Politika bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik, khususnya di bidang literasi politik dan digital, guna meningkatkan kesadaran politik. kapasitas untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk terlibat dalam analisis kritis terhadap masyarakat umum. Kemudian, pemerintah perlu menjelaskan undang-undang tersebut, yang didukung dengan sanksi tegas terhadap konten politis yang menggunakan subjek Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam wacana publik di semua tingkatan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Ideologi politik politik Indonesia sangat beragam dan menggerogoti kemauan masyarakat. Pelatihan wawasan kebangsaan dan uji wawasan kebangsaan kepada calon peserta pemilu agar memiliki kesadaran untuk tidak menggunakan identitas politik dalam kontestasi politik sebagaimana untuk menghindari partai politik terjebak kewarganegaraan.

Selanjutnya, politik harus digunakan untuk membuat perhitungan berkala atas aset-aset publik, termasuk uang dan tenaga kerja, dan untuk merumuskan filsafat politik yang partisan dan rasional. Terakhir, tindakan politik harus diambil sesuai kebutuhan untuk mencegah perpecahan tajam dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi identitas politik. Populisme dan politik identitas, jika terus berlanjut, akan menjadi penghambat demokrasi Indonesia, menghambat kemajuan bahkan di bidang-bidang yang terdapat perbedaan. Untuk memitigasi potensi tersebut, masyarakat dapat disadarkan agar tidak terjebak dalam pola pikir “mayoritas merasa minoritas” yang dipupuk oleh kelompok yang bersangkutan. Ruang dialog yang terbuka dan jujur harus dibangun di negara ini untuk memastikan persamaan hak dan tanggung jawab dalam partisipasi dan pemerintahan dalam masyarakat demokratis.

Daftar Pustaka

- AL-FARISI, Leli Salman. Politik identitas: ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara pancasila. *Aspirasi*, 2020, 10.2: 77-90.
- Asmaroini, Ambiro P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, (No. 1), pp. 50–64.
- ANAM, Haikal Fadhil. Politik identitas Islam dan pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Politik Islam, POLITEA*, 2019, 2.2.
- ARDIYANTI, Dwi; LAIA, Anastasia Meilin Gita Permata; NABIYYIN, M. Hafiz. Demokrasi, Penegakan Hukum dan Politik Identitas di Indonesia. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2019, 2.2: 94-106.
- Budiardjo, Miriam, 1980, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Gafar, Afan, 2002, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI dan CV Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Mahfud MD, Moh., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Pito, Toni Adrianus 2006, *Mengenal Teori-Teori Politik, Dari Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HABIBI, Muhammad. Analisis politik identitas di Indonesia. 2018.
- HABODDIN, Muhtar. Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 2012.
- HERMANSYAH, Yus. Politik Identitas Lokal Dalam Proses Demokrasi Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 2022, 14.02: 139-158.
- LESTARI, Yeni Sri. Politik identitas di Indonesia: Antara nasionalisme dan agama. *Journal of Politics and Policy*, 2018, 19-30.
- WINGARTA, I. Putu Sastra, et al. Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 2021, 9.4: 117-124.